

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai satu kesatuan wadah yang memuat ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi dan sumber dayanya, diperlukan peningkatan kinerja pengelolaannya secara arif, efektif, dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penataan ruang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan ruang wilayah nasional guna mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Menurut (UU No. 26 Tahun 2007), ruang darat, laut dan udara lebih dikenal sebagai ruang alam (kosmos) jika dilihat dari filosofi dasarnya. Namun, jika dihubungkan dengan mekanisme kegiatan manusia dan pendekatan pembangunan yang ada, maka kontrol sistem kawasan dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan non-budidaya. Artinya, penguasaan lingkungannya perlu dilindungi dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Aturan perencanaan tentang penataan ruang selama ini hanya terfokus pada pengelolaan ruang daratan, sehingga ruang laut tidak terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dan cenderung menjadi ruang bebas. Sampai saat ini kawasan pesisir belum diperhatikan sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh antara ruang darat dan laut. Pemanfaatan dan pengelolaan zona pesisir cenderung bersifat spesifik per sektor, hal ini seringkali menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih. Kompleksitas proses dan kerentanannya kawasan pesisir yang dihasilkan dari interaksi manusia dan alam membutuhkan perencanaan dan

penanganan yang ekstensif untuk mengatasi tekanan di kawasan pesisir. Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan kawasan pesisir, permasalahan yang ada harus dipertimbangkan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi secara keseluruhan (Dirhamsyah, 2009). Selain itu, karena lahan merupakan sumber daya alam yang terbatas, rencana dalam penggunaan lahan untuk wilayah pesisir harus disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan dan produktivitas lahan yang digunakan. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya mencari potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan sehingga dapat menyebabkan *multiplier effect* bagi wilayah disekitarnya, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai sebuah kesatuan wilayah di Kabupaten Buleleng terus melakukan pembangunan dengan mengupayakan pembagian sektor potensial secara parsial dalam pengembangan wilayah menuju pembangunan yang bersinergis untuk wilayah pembangunan Bali Utara. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan yang tepat guna mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayahnya.

Di satu sisi, wilayah Lovina merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam hal habitat bagi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pelestarian alam, nilai produktif serta rekreasi/pariwisata. Kawasan ini memiliki keanekaragaman ekosistem yang relatif besar dan lengkap, seperti perwakilan ekosistem pesisir, padang lamun (*seagrass beds*), dan dataran pasang surut (*tidal flats*). Kawasan pesisir Lovina memiliki berbagai habitat (ekosistem) yang saling berhubungan dan saling bergantung sebagai perwakilan dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir Lovina berada di lokasi yang sangat strategis, karena berada di pusat pertumbuhan bisnis dan pariwisata di Bali Utara. Saat ini terindikasi terdapat bukti bahwa kawasan pesisir Lovina menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan lahan di pesisir kawasan Lovina, diantaranya banyak penggunaan lahan selain aktivitas pantai. Keanekaragaman nilai strategis kepentingan yang berbeda di kawasan pesisir Lovina mendorong upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut. Hal ini sering menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang di kawasan Lovina.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 menyebut ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana – rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Pengertian penataan ruang secara umum adalah merupakan proses yang terpadu mencakup tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan.

Perencanaan tata ruang pariwisata (*tourism spatial planning*) tampaknya kurang memperhatikan pemahaman akan pariwisata sebagai bisnis dan industri, sebagai sumber mata uang (devisa) dan lainnya. *Tourism planning* sendiri masih relatif baru. Menurut sejarah di berbagai negara maju, perkembangan pariwisata diawali dengan munculnya hotel dan wisma (penginapan) untuk melayani wisatawan. Ada yang dibangun di pinggir pantai untuk menampung wisatawan yang berkeinginan menikmati keindahan alam dan kesempatan rekreasi pantai. Ada juga hotel yang dibangun di lokasi strategis untuk mengakomodasi para pelaku perjalanan yang perlu transit (singgah) sebelum tiba di tempat tujuan.

Meskipun tidak dirancang secara khusus, dua contoh di atas menggambarkan bagaimana pariwisata dikaitkan dengan pertimbangan aspek ruang: mencari tempat yang indah, mencari "titik lelah" di mana pelaku perjalanan membutuhkan transit. Perjalanan selalu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki berbagai kepentingan, seperti, berdagang, mencari jawaban atas rasa ingin tahu tentang suatu tempat. Tetapi berwisata sebagian besar dipahami sebagai perjalanan untuk *leisure and pleasure*. Kenyataannya pariwisata mencakup perjalanan untuk berbagai keperluan, selain perjalanan awak pesawat, perjalanan rutin untuk mencari nafkah, sekolah dan rutinitas lainnya.

Perkembangan lebih lanjut tercermin dari meningkatnya jumlah orang serta berbagai tempat wisata, yang juga menawarkan daerah-daerah dengan panorama daerah yang tidak kalah menarik bagi wisatawan. Fenomena tersebut mendorong berbagai kegiatan lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta masyarakat setempat, yang juga tumbuh dengan bertambahnya sarana akomodasi.

Konflik yang berkaitan dengan penggunaan ruang dan sumber daya lainnya (air), ketimpangan pelayanan, dan sebagainya meningkatkan kesadaran akan perlunya perencanaan yang matang, yaitu dengan menempatkan pengembangan kepariwisataan dalam *Needs Assessment* untuk pengembangan wilayah yang lebih luas. Dari sisi lain, juga perlu persiapan mengantisipasi hubungan antara tuan rumah/masyarakat dengan wisatawan. Persoalan dapat muncul ketika pariwisata menjangkau wilayah yang semula terisolir, tempat alami untuk melepas suasana urban yang menimbulkan berbagai tekanan bagi masyarakat atau bagi lingkungan. Tempat-tempat di berbagai negara berkembang menjadi sasaran itu, kemudian masyarakat setempat dapat termarjinalkan.

Perkembangan pariwisata identik dengan visi ekonomi. Pariwisata dianggap sebagai sektor ekonomi (industri dan bisnis) yang menjanjikan keuntungan bagi negara, pemerintah daerah, dan pengusaha. Disisi lain daya dukung, sering terlampaui. Tidak jarang alam dan warisan budaya yang semula menjadi daya tarik menjadi “korban”. Destinasi wisata berkembang secara dinamis dan terus berubah. Tempat yang ramai (*overcrowded*) ditinggalkan, wisatawan mencari tempat baru, tempat lama menjadi sasaran oleh kategori/kelompok wisatawan lain. Tempat-tempat lama yang bermasalah ditinggalkan dan tempat-tempat baru dicari untuk menarik kunjungan wisatawan baru.

Kota-kota besar juga menjadi tujuan wisata dari berbagai negara atau berbagai belahan negara dengan daya tarik yang berbeda. Berbagai peninggalan budaya, atau sekadar modernitas dan segala kecanggihan layanan hiburan dan segala kelengkapan hiburan menjadi daya tarik utamanya. Dalam mengikuti proses suburbanisasi yang menyebabkan banyak pusat kota industri ditinggalkan,

kemudian muncul kreativitas untuk mengubah tempat ini menjadi pusat hiburan (rekreasi) dengan bangunan bersejarah atau mengubah pelabuhan tua menjadi pusat rekreasi dan hiburan. Ada juga beberapa model pengembangan lainnya. Kegiatan rekreasi tidak hanya dikembangkan dalam satu kawasan, tetapi dalam satu bangunan yang terintegrasi dengan bisnis dan jasa lainnya. Dalam hal ini, tempat seperti itu menjadi tujuan penduduk dan pendatang.

Destinasi wisata memanfaatkan segala bentuk, mulai dari resor pegunungan, pantai, pulau-pulau kecil, pusat kota, seluruh kota, daerah antar kota yang subur hingga lokasi terpencil. Perhatian terhadap pengelolaannya menjadi semakin mendesak, sehingga pemahaman akan perlunya perencanaan berkembang sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang muncul di sana-sini, khususnya di Indonesia.

Perspektif berbagai pemangku kepentingan tentang penataan ruang dan pengembangan pariwisata, di satu sisi, dan pelestarian nilai-nilai alam, di sisi lain, sering menimbulkan konflik (Almeida, Costa, & Nunes da Silva, 2017). Analisis mendalam tentang sumber-sumber konflik sangat penting untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelolanya, khususnya mengenai pengembangan pariwisata dan perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan nilai alam. (Almeida et al., 2017) mengategorikan konflik tata ruang kepariwisataan menjadi organisasi kelembagaan, kebijakan dan undang-undang publik, kekuasaan, kendala struktural lainnya (misalnya waktu dan sumber daya), informasi dan kepentingan, nilai dan hubungan pemangku kepentingan. Lebih jauh, (Flyvbjerg & Richardson, 2002) menegaskan bahwa relevansi meneliti konflik dalam konteks perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan tidak dapat disangkal dan belajar

bekerja secara efektif dengan konflik dapat dijadikan dasar untuk paradigma perencanaan yang kuat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak, sehingga Indonesia juga menyandang gelar pulau seribu, pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh lautan, sehingga Indonesia memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas dengan kekayaan alam yang beragam. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang kaya akan keindahan sumber daya alamnya. Keindahan sumber daya alam Bali masih dikenal sebagai salah satu tujuan wisata dunia, meskipun terdapat kesenjangan dalam pengembangan pariwisata Bali yaitu perkembangan pariwisata di Bali utara seperti Buleleng tidak secepat perkembangannya pariwisata di Bali Selatan, seperti Kuta, Nusa Dua, Sanur dan sekitarnya.

Padahal jika melihat potensi pariwisata Bali Utara tidak kalah dengan potensi pariwisata Bali Selatan, sehingga perlu dikembangkan pariwisata yang menitikberatkan pada aspek kelestarian dan berkesinambungan di kawasan Bali Utara. Potensi sumber daya pantai utara Bali seperti hutan mangrove, pantai berpasir, ekosistem ikan dan terumbu karang dapat dikembangkan untuk ekowisata pesisir, karena ekowisata merupakan kegiatan wisata yang didasarkan pada pertimbangan perlindungan lingkungan dan aspek konservasi lingkungan.

Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun terakhir mengoptimalkan pengembangan investasi pariwisata. Upaya ini dilakukan karena banyaknya peluang wisata di daerah Buleleng yang belum dikelola secara maksimal. Perkembangan ini didorong tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat lokal, dan peran pihak ketiga (investor) semakin terfokus pada

potensi wisata bahari, pemandangan alam, agrowisata dan wisata budaya. Potensi wisata yang bersangkutan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu::

1. Potensi Wisata Alam

Potensi wisata alam berkaitan dengan kondisi di suatu kawasan, jenis flora dan fauna, pemandangan alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain (kondisi fisik kawasan). Kawasan Lovina memiliki keunggulan dan keunikan alam, jika kawasan Lovina dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut.

2. Potensi Wisata Budaya

Potensi wisata budaya di kawasan Lovina berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan sejarah berupa bangunan seperti monumen dan candi yang dihasilkan oleh segala kreasi, emosi dan karsa masyarakat setempat.

3. Potensi Wisata Manusia

Potensi wisata manusia juga menjadi tujuan wisata di kawasan Lovina yang meliputi pertunjukan tari, pementasan atau seni budaya di suatu kawasan. Buleleng memiliki potensi wisata budaya yang belum banyak diketahui oleh wisatawan khususnya di kawasan wisata Lovina.

Sampai saat ini kawasan wisata Lovina hanya dikenal dengan wisata alamnya saja yaitu *Lovina Dolphin Tour* yang terkenal dari Pantai Lovina hingga Pantai Hepi di Desa Pamaron. Padahal jika dicermati dengan baik, terdapat banyak potensi wisata budaya, seperti tradisi "Sampi Gerumbungan" yang diadakan setahun sekali dalam Festival Lovina, tradisi "Megebeg-Gebegan" di

Desa Tukadmungga, keberadaan bangunan kuno seperti candi Budha dan Pura Kawitan Majapahit di Desa Kalibukbuk serta warisan museum Anak Agung Panji Tisna di Desa Kalibukbuk. Adanya beberapa wisata budaya tidak menutup kemungkinan masih ada lagi wisata budaya yang belum dikembangkan di kawasan wisata Lovina.

Kawasan wisata Lovina sendiri hanya dikenal dengan wisata bahari, populer untuk melihat lumba-lumba mulai dari Pantai Lovina hingga Pantai Hepi di Desa Pamaron. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kawasan wisata Lovina memiliki potensi destinasi wisata budaya yang dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Dari sektor pariwisata, kawasan Kalibukbuk memiliki berbagai daya tarik wisata alam maupun binaan yang dapat mendorong perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di kawasan Kalibukbuk. Salah satu objek destinasi wisata unggulan di kawasan Kalibukbuk adalah Pantai Lovina. Destinasi wisata pantai di Lovina ini merupakan destinasi wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan karena menawarkan banyak peluang lain yang dapat mendukung perkembangan wisata alam di pantai Lovina dan menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi terkait rencana revisi atau perubahan Perda Kabupaten Buleleng No.9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Buleleng Th 2013-2033, di mana didasarkan pada rencana beberapa proyek pengembangan infrastruktur yg masif seperti: Bandara Bali Utara, jalan tol lingkar Bali, jalan *shortcut* ruas jalan singaraja-mengwitani di titik

7 & 8, pengembangan pelabuhan celukan bawang, dan tol laut Bali-Nusa Tenggara.

Urgensi penelitian ini juga terkait rencana strategis jangka panjang terkait pengembangan Desa Kalibukbuk menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Kalibukbuk, dengan karakter kekhasannya yaitu sebagai kecamatan dengan nuansa atau konsentrasi kepariwisataan, agar Lovina ke depan menjadi simbol motor penggerak kepariwisataan Buleleng.

Pariwisata dianggap sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata menciptakan banyak kesempatan kerja. Disisi lain, sosiolog mencatat perbedaan kepentingan antara tuan rumah dan tamu. Pemerhati lingkungan prihatin dengan dampak lingkungan dari pariwisata di berbagai daerah. Perencanaan penataan ruang seharusnya yang mempertimbangkan berbagai dimensi dan perspektif yang berbeda. Namun dalam perencanaan tata ruang banyak ditemui permasalahan lain, padahal pariwisata hanya salah satu penggunaan fungsi tata ruang lahan.

Nampaknya kebutuhan lain seperti perumahan, transportasi, bisnis dan industri manufaktur dipandang lebih mendesak daripada sekadar mengejar "hiburan dan kesenangan". Masalah yang muncul dari hal ini adalah perencanaan kurang berbicara tentang pariwisata. Pada saat yang sama, para pakar pariwisata umumnya berorientasi untuk mempertimbangkan pengembangan kreativitas untuk menyenangkan wisatawan dengan penawaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ini berarti bahwa kepentingan pelanggan lebih penting daripada kepentingan masyarakat..

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya berkelanjutan yang meliputi segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan meliputi kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) ditegaskan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”. Dalam *Need Assessment* menjadi hal penting untuk mencermati upaya-upaya untuk mencapai visi strategi penataan ruang, yaitu ruang yang aman, nyaman, kreatif dan berkesinambungan..

Pada masa reformasi, pembangunan daerah mengalami perubahan wewenang. Menurut Pasal 14(2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang sendiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, khususnya perencanaan tata ruang, penggunaan dan inspeksi. Pemerintah Pusat menyelenggarakan Penataan Ruang Nasional, untuk provinsi Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten merupakan kewenangan kabupaten. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang meliputi ruang darat, ruang udara, ruang laut termasuk daratan, harus dikelola secara arif, efektif dan efisien.

Rencana tata ruang dapat dijadikan pedoman pembangunan yang dianggap perlu, berprioritas tinggi dan mempunyai nilai strategis untuk percepatan pembangunan. Rancangan tata ruang memuat rancangan tata ruang yang bersifat

umum dan masih diperlukan rancangan yang lebih merinci untuk melaksanakan rencana tata ruang kawasan perkotaan dan pedesaan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Tata Ruang No. 15 Tahun 2010. Kebijakan publik adalah seperangkat kebijakan yang diamanatkan pemerintah dengan tujuan khusus berkenaan dengan masalah tertentu yang ditujukan untuk memecahkan masalah publik.

Suatu kebijakan publik yang ditetapkan atau disahkan belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam suatu rumusan kebijakan. Tujuan dari kebijakan yang dirumuskan dapat dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut atau pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu dan mampu membuat perbedaan atau mempengaruhi sesuatu. Dalam memahami kebijakan publik, kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan pelaksanaan kebijakan, menggunakan sumber daya yang diberikan, untuk menghasilkan efek berdasarkan tujuan kebijakan tersebut.

Pasolong (2008:38-39) secara konseptual menjelaskan kebijakan publik, yang dapat ditemukan dalam Kamus Administrasi Publik, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Biasanya kebijakan penataan ruang wilayah tercantum dalam Undang-Undang Tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, dalam penelitian ini kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kalibukbuk Lovina. Penataan ruang menjadi aspek yang semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan beberapa persoalan di

daerah yang memerlukan solusi penyelesaian dari aspek tata ruang. Selain itu, tumbuh pemahaman bahwa pembangunan yang diarahkan dan direncanakan secara lokal menghasilkan hasil yang lebih optimal secara regional. Karena itu, pemerintah mencoba berbagai cara untuk menata ruang secara lebih efektif. Penataan ruang terjadi pada tingkat wilayah dan kota yang melibatkan aspek penataan ruang, penggunaan lahan, dan pengelolaan penggunaan lahan yang saling terkait.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Ruang, bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana daerah kabupaten sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai arah pelaksanaan pembangunan, perencanaan tata ruang wilayah bertujuan untuk merumuskan penggunaan lahan yang optimal, efisien dan lestari bagi masyarakat serta mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu.

Rencana tata ruang merupakan payung hukum yang fleksibel, yang memiliki arti bahwa rencana tata ruang harus mampu memenuhi tuntutan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan seras *stakeholder* yang terkait. Revisi rencana tata ruang diperlukan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul akibat faktor eksternal dan internal. Urutan faktor eksternal dan internal mengharuskan rencana diperbarui melalui tinjauan rencana. Pemantauan kebijakan nasional, faktor eksternal dan faktor internal wilayah memerlukan integrasi dinamis tata ruang wilayah, khususnya di Kabupaten Buleleng, ke dalam satu kesatuan pengelolaan lingkungan berdasarkan kondisi lingkungan fisik, kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi.

Untuk meningkatkan perekonomian wilayah Kalibukbuk, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sektor unggulan dengan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan daerah. Kalibukbuk Lovina melalui pemanfaatan yang efisien, ekologis dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kaidah tata ruang, sehingga kualitas ruang kawasan Kalibukbuk Lovina tetap terjaga di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang kawasan Kalibukbuk Lovina memiliki maksud dan tujuan yang baik, namun pada kenyataannya permasalahan politik tersebut sering muncul. Kalibukbuk Lovina seringkali menghadapi beberapa permasalahan dalam kebijakan perencanaan wilayah. Salah satu masalah tersebut adalah terjadinya konflik penggunaan ruang. Perubahan penggunaan lahan juga umum terjadi. Petak kebun dengan kawasan pemukiman dapat dilihat di dalam pemukiman di pedesaan. Kehidupan di kawasan perbukitan kini semakin meningkat, hal ini menjadi permasalahan baru karena kawasan perbukitan di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan sebagai kawasan penyangga. Keberadaan bangunan masyarakat yang dibangun sebelum berdirinya kabupaten pada tahun (Yoeti, 1985) adalah sebagai berikut..

Dalam proses pengembangan objek wisata, beberapa kriteria pengembangan pariwisata harus diperhatikan agar objek tersebut diminati oleh wisatawan, yaitu: 1. *Something to see* adalah sesuatu yang dilihat sebagai daya tarik wisata harus memiliki sesuatu yang dapat dilihat oleh wisatawan atau membuat wisatawan melihat. Dengan kata lain, objek tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi objek tersebut. 2. *Something to do* adalah agar pengunjung ketika berkunjung ke sana dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menghadirkan rasa senang, bahagia, rileksasi berupa sarana rekreasi, baik itu taman bermain atau taman bermain tempat makan khususnya makanan khas tempat ini. tempat untuk membuat wisatawan lebih nyaman untuk tinggal di sana. 3. *Something to buy* adalah

kemudahan bagi wisatawan untuk berbelanja, seringkali merupakan ciri khas atau simbolik daerah tersebut, sehingga dapat dijadikan oleh-oleh..

Berdasarkan perkembangannya, status objek wisata di kawasan Kalibukbuk Lovina belum memenuhi kriteria pengembangan wisata yaitu *Something to do* belum memenuhi fasilitas yang menunjang kegiatan wisata jadwal agar wisatawan merasa puas. Dilihat dari keadaan objek wisata Kalibukbuk Lovina saat ini masih sangat padat dari segi amenities wisata, seperti kepadatan penginapan, rumah makan/restoran, MCK, keamanan, keamanan dll, kurangnya fasilitas MCK/mandi, mushola. ruang. Sedangkan menurut kriteria *Something to buy* barang wisata di kawasan Kalibukbuk Lovina terdapat toko yang menjual oleh-oleh/symbol khas daerah tersebut. Berdasarkan kriteria pengembangan wisata, kawasan Lovina tidak terlalu padat dibandingkan dengan kawasan tata guna lahan yang direncanakan.

Tempat wisata datang dalam segala bentuk, dari lokasi pegunungan, pantai, pulau kecil, pusat kota, seluruh kota, dari daerah pinggiran kota yang subur hingga lokasi terpencil. Perhatian terhadap penataannya menjadi semakin mendesak, sehingga berkembang pemahaman akan perlunya perencanaan, sebagai bagian dari respon atas permasalahan yang timbul di sana-sini..

Implementasi tata ruang dan wilayah yang diterapkan atau dijalankan oleh suatu lembaga pariwisata tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun semuanya dapat dinilai dengan menggunakan model penilaian yang disebut Model CSE-UCLA (*Center for the study of evaluation University of California in Los Angeles Evaluation Model*). Model CSE-UCLA memiliki lima dimensi evaluasi (*system assessment, program planning, program*

implementation, program improvement, program certification), lima dimensi yang dimiliki oleh model CSE-UCLA menjadi alasan Model ini sangat cocok digunakan dalam mengevaluasi tata ruang kawasan resort wisata di Kalibukbuk Lovina karena kelima dimensi yang dimilikinya dapat memberikan suatu informasi tentang keadaan sistem, pemilihan program, memperkenalkan program, baik dari segi fungsi maupun manfaat yang diberikan. Selain itu, model ini memiliki keunggulan lain dibandingkan model evaluasi lainnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan program dapat memperkenalkan keberadaan program yang dievaluasi.

Hal ini sesuai dengan pandangan Alkin bahwa model evaluasi UCLA memiliki langkah-langkah eksekusi program yang dapat memperkenalkan keberadaan program yang sedang dievaluasi ketika langkah tersebut tidak dimiliki oleh model evaluasi harga lainnya. Untuk mengetahui hasil penilaian tata ruang kawasan wisata Kalibukbuk Lovina, perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA terhadap mengimplementasikan sistem evaluasi tata ruang kawasan resort Tourism di Kalibukbuk Lovina.

Seperti yang dikemukakan Tayibnaps (dalam Divayana 2015) bahwa model CSE-UCLA yang dikembangkan oleh Alkin memiliki lima jenis tahapan evaluasi, yaitu: Sistem *assessment program planning, program implementation, program improvement* dan *program certification*. Sistem *assessment* merupakan evaluasi yang memberikan informasi mengenai posisi sistem. Program *Planning* yaitu evaluasi yang membantu pemilihan program. Program *Implementation* yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi yang digunakan untuk memperkenalkan program. Program *Improvement* yaitu evaluasi yang memberikan informasi dari

kinerja program. Program *certification* yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program.

Permasalahan yang telah dijelaskan di atas dapat diidentifikasi melalui penelitian, dalam penelitian ini proses implementasi kebijakan tata ruang kawasan di Kalibukbuk Lovina dianalisis menggunakan penilaian berdasarkan CSE-UCLA meliputi isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan *Needs Assessment* implementasi (Grindle, 1980). Tujuan kebijakan menjadi dasar pengukuran luaran program pengukuran untuk menjadi keseluruhan implementasi kebijakan yang dievaluasi. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan. Studi ini merupakan studi evaluasi program yang merupakan kawasan bahan kajian Penelitian Evaluasi Pendidikan yang meliputi evaluasi program, metode penelitian dengan aplikasi statistik, maka dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang di Kawasan wisata Kalibukbuk Lovina Sebagai Daya Tarik Resort Tourism.

1.2 Identifikasi Masalah

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah terkait rencana revisi atau perubahan Perda Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Buleleng Th 2013-2033, di mana didasarkan pada rencana beberapa proyek pengembangan infrastruktur yg masif seperti: Bandara Bali Utara, jalan tol lingkar Bali, jalan *shortcut* ruas jalan Singaraja-Mengwitani di

titik 7 & 8, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, dan tol laut Bali Nusa Tenggara.

Berdasarkan Bali Perda No. 3 2020 Tentang RTRWP Provinsi Bali Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa daerah Lovina menjadi salah satu kawasan tata ruang provinsi Bali. Rencana strategis jangka panjang terkait pengembangan desa Kalibukbuk menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Kalibukbuk Lovina, dengan karakter kekhasannya yaitu sebagai kecamatan dengan nuansa atau konsentrasi kepariwisataan, agar Lovina ke depan menjadi simbol motor penggerak kepariwisataan Buleleng. Rencana tata ruang bisa dijadikan menjadi panduan pada pembangunan yang dicermati perlu prioritas serta mempunyai nilai strategis pada akselerasi pembangunan. Rencana tata ruang memuat rancangan yang bersifat generik serta masih diharapkan rancangan tata ruang yang merinci dan mengoperasionalkan rancangan tata ruang daerah yaitu tata ruang daerah perkotaan dan tata ruang daerah perdesaan selaras dengan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Tata Ruang.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan tertentu berkenaan dengan permasalahan tertentu diorientasikan dalam penyelesaian kasus publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diperlukan sanggup mengatasi kebutuhan atau harapan berbagai pihak. Suatu kebijakan publik yang sudah ditetapkan atau disahkan, belum tentu sanggup menuntaskan kasus yang sebagai acuan pada perumusan kebijakan tersebut. Tujuan menurut kebijakan yang sudah diformulasikan bisa dicapai melalui penerapan kebijakan tersebut atau diistilahkan menggunakan implementasi

kebijakan. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak tertentu.

Mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan ruang, bahwa setiap wilayah Kabupaten wajib menyusun rancangan tata ruang daerah Kabupaten sebagai pedoman pembangunan. Perencanaan tata ruang daerah Kabupaten adalah upaya pemanfaatan ruang secara optimal, efisien dan lestari bagi aktivitas masyarakat didaerahnya berupa pembangunan sektoral, wilayah, serta swasta dalam mewujudkan taraf kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada periode waktu tertentu.

Rencana tata ruang merupakan payung hukum yang fleksibel, yang memiliki arti bahwa rencana tata ruang harus mampu memenuhi tuntutan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan serta *stakeholder* yang terkait. Revisi rencana tata ruang diperlukan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul akibat faktor eksternal dan internal. Urutan faktor eksternal dan internal mengharuskan rencana diperbarui melalui tinjauan rencana. Pemantauan kebijakan nasional, faktor eksternal dan faktor internal wilayah memerlukan integrasi dinamis tata ruang wilayah, khususnya di Kabupaten Buleleng, ke dalam satu kesatuan pengelolaan lingkungan berdasarkan kondisi lingkungan fisik, kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi.

Tempat wisata datang dalam segala bentuk, dari lokasi pegunungan, pantai, pulau kecil, pusat kota, seluruh kota, dari daerah pinggiran kota yang subur hingga lokasi terpencil. Perhatian terhadap penataannya menjadi semakin mendesak, sehingga berkembang pemahaman akan perlunya perencanaan, sebagai bagian dari respon atas permasalahan yang timbul di sana-sini..

Tempat wisata memanfaatkan segala bentuk, mulai menurut lokasi pada pegunungan, pantai, pulau kecil, sentra kota, semua bagian kota, daerah fertile antarkota sampai loka terpencil. Perhatian buat menatanya semakin mendesak, maka berkembanglah pemahaman terhadap kebutuhan perencanaan, menjadi bagian menurut tanggapan terhadap perseteruan yg muncul pada sana sini.

Aktivitas kepariwisataan memberi dampak yang sangat besar pada ekonomi, identitas budaya, serta fisik lingkungan hidup (Flyvbjerg & Richardson, 2002). Namun demikian, dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan seperti peningkatan kepadatan penduduk dan pengembangan yang bersifat tidak berkelanjutan di tempat-tempat wisata yang paling banyak dikunjungi, tetap perlu diperhatikan. Oleh karenanya, diperlukan distribusi pengembangan resor pariwisata yang cermat (Flyvbjerg & Richardson, 2002). Pariwisata berkelanjutan telah menjadi tujuan selektif dari produk pariwisata. Destinasi menjadi seperangkat produk dan layanan pariwisata yang menyiratkan kepentingan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan. Bahkan, konsep-konsep baru untuk menambah daya saing seperti pengembangan destinasi yang berkelanjutan, perencanaan destinasi dan implementasi pengelolaan kualitas yang terintegrasi telah dikembangkan (Flyvbjerg & Richardson, 2002).

Perencanaan destinasi memerlukan pemikiran yang cermat agar dapat menjaga keberlanjutan destinasi dan kegiatan kepariwisataan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, sebagaimana diuraikan sebelumnya, fenomena yang terjadi terkait perencanaan tata ruang di Kalibukbuk menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian.

Model CSE-UCLA digunakan dalam penelitian ini sebagai model analisis implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kalibukbuk Lovina. Berdasarkan uraian pemaparan permasalahan yang diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Evaluasi Berbasis Model UCLA Terhadap Implementasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kawasan Kalibukbuk Lovina Sebagai Daya Tarik Resort Tourism. Permasalahan atau pertanyaan yang lain masih banyak dapat diajukan, akan tetapi mengingat kompleksnya, permasalahan maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan.

1.3. Pembatasan Masalah

Kawasan Pesisir dianggap sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang dari aktivitas yang cukup tinggi hingga aktivitas yang tinggi. Perkembangan kawasan pesisir menjadi kawasan budidaya dan aktivitas tinggi juga dipengaruhi oleh topografinya yang datar atau landai sehingga memudahkan perencanaan dan pembangunan. Kawasan pemerintahan adalah wilayah yang tugas pokoknya dipusatkan pada kegiatan pemerintahan. Wilayah administrasi ini jelas didominasi oleh gedung-gedung administrasi. Perencanaan wilayah administrasi ini berfungsi untuk mengintegrasikan penyelenggara pelayanan publik satu sama lain.

Pengembangan kawasan wisata Lovina diselaraskan dengan RTRW kawasan Kalibukbuk sebagai kawasan wisata. Pengelolaan akses sumber daya alam, budidaya, pariwisata, persampahan, air bersih, transportasi dan ekonomi mempengaruhi kawasan Kalibukbuk itu sendiri Adanya beberapa kegiatan baru di kawasan wisata Kalibukbuk juga menjadi salah satu penyebab ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan rencana. Dengan adanya fungsi-fungsi baru, seperti kawasan

administrasi dan perguruan tinggi, muncul fungsi-fungsi kecil lainnya di kawasan tersebut, yang tidak masuk dalam rencana detail pengembangan Kawasan Wisata Kalibukbuk.

Penetaan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah adalah suatu sistem perencanaan wilayah, pengolahan dan pengelolaan lahan. Tujuan penataan wilayah menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah pemanfaatan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : (a). Tercapainya keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, (b). Terlaksananya keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan (c). Terlaksananya perlindungan fungsi ruang dan menghindari efek negatif terhadap lingkungan dari penggunaan ruang.

Kesesuaian lahan dalam kamus perencanaan wilayah adalah persoalan kesesuaian dan ketidaksesuaian lahan untuk tujuan tertentu. Pengertian kesesuaian lahan lainnya adalah gambaran tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian tanah dapat dinyatakan dalam kategori dan subkategori yang diperoleh dengan membandingkan kualitas lahan dengan persyaratan penggunaan lahan tertentu. Saat mengevaluasi luas lahan, satuan lahan digunakan sebagai satuan peta atau satuan ketinggian. Unsur-unsur pembentuk satuan tanah adalah bentuk tanah, kemiringan tanah, tanah dan penggunaan lahan.

Secara umum, evaluasi pada dasarnya mencakup semua pengambilan keputusan dan proses deliberatif yang dirancang untuk mengevaluasi pekerjaan publik dan akuntabilitas (Alexander et al., 2006). Evaluasi menurut (Firman &

Sirait, 1984) adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Program evaluasi adalah penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, fiskal, dan implikasi infrastruktur pada guna lahan dan rencana pengembangan. Dalam teori, evaluasi merupakan perbandingan kuantitatif dari alternatif-alternatif rencana pada hasil yang aktual atau potensial dari tujuan dan sasaran yang dipilih. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan biasanya dilakukan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan dengan kemampuannya. Dengan mengetahui gambaran kondisi pemanfaatan ruang dengan kemampuan lahannya maka akan dapat diberikan rekomendasi untuk perbaikan rencana penggunaan lahan. Merekomendasikan perubahan penggunaan fungsi lahan sesuai kemampuannya sesuai syarat-syarat yang diperlukan lahan tersebut sehingga lahan tidak rusak dan dapat digunakan secara lestari.

Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, sosial budaya, maupun objek wisata minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim perencana pengembangan objek daya tarik wisata

harus mampu mengasumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan. (Zhang et al., 2011) mengungkapkan, bila dibandingkan dengan standar profesional untuk evaluasi proyek, dan setelah dinilai oleh utilitas mereka, kelayakan, kepatuhan dan akurasi, pendekatan terbaik yang telah muncul adalah model evaluasi *Needs Assessment, program planning, formative evaluation, summative evaluation*. Model CSE-UCLA termasuk dalam kategori perbaikan/akuntabilitas, dan merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan. Model CSE-UCLA adalah model yang paling banyak digunakan untuk evaluasi program karena model tersebut memiliki fase evaluasi yang terencana, sistematis dan hasil yang terukur dengan jelas..

Kuo, dkk (2002) menyatakan bahwa kemungkinan karakteristik yang paling signifikan dari CSE-UCLA adalah bahwa hal itu membuat ketentuan untuk evaluasi holistik. Dikatakan demikian karena unsur-unsurnya adalah sistem berorientasi, terstruktur untuk mengakomodasi kebutuhan evaluasi yang bersifat universal.

Banyak faktor yang dapat dipertimbangkan secara holistik dalam studi evaluasi ini, namun karena keterbatasan waktu, biaya dan keterampilan peneliti, ruang lingkup studi ini terbatas pada efektivitas implementasi perencanaan wilayah di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik wisata resor. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini terbatas yaitu kualitas implementasi rencana tata ruang kawasan kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai resort sebagai destinasi wisata sesuai *Needs Assessment, Program Planning, Formative Evaluation, Summative Evaluation*, dan keterbatasan yang ada. dalam pelaksanaan program

mutu pelaksanaan rencana, penataan kawasan di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai objek wisata..

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Needs Assessment*?
2. Bagaimanakah kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Program Planning*?
3. Bagaimanakah kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Formative Evaluation*?
4. Bagaimanakah kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Summative Evaluation*?
5. Bagaimanakah efektivitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism*?
6. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rencana tata ruang wilayah di Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik *resort tourism*?

7. Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk pengelolaan program rencana tata ruang wilayah di Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik resort tourism?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi dan menentukan implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Needs Assessment*.
2. Untuk mengevaluasi dan menentukan kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Program Planning*.
3. Untuk mengevaluasi dan menentukan kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Formative Evaluation*.
4. Untuk mengevaluasi dan menentukan kualitas implementasi penataan ruang di kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai *resort tourism* ditinjau dari *Summative Evaluation*.
5. Untuk mengetahui efektivitas dan mendeskripsikan implementasi tata ruang di Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik *resort tourism*.
6. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan kendala-kendala apa saja yang dihadapi serta cara untuk mengatasi dalam

pelaksanaan program tata ruang di Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik *resort tourism*.

7. Saya mengharapkan kepuasan dari rekomendasi – rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Suatu penelitian akan dikatakan berhasil apabila dapat memberikan kegunaan yang berarti bagi bidang yang ditelitinya. Secara garis besar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan IPTEK yaitu dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang CSE- UCLA dalam pelaksanaan program kualitas implementasi rencana tata ruang di Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai daya tarik wisata resor, serta inovasi terbaru yang dapat mewujudkan dan menerapkan pada dunia pariwisata. Kebaruan model CSE-UCLA ini memberikan urgensi berupa: 1) memberikan masukan suatu program dihentikan atau diteruskan, 2) memberikan masukan prosedur mana yang perlu diperbaiki, 3) mengevaluasi strategi, atau teknik yang perlu dihilangkan/diganti, 4) memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain, 5) memberikan masukan dana harus dialokasikan kemana, 6) memberikan masukan apakah teori/pendekatan tentang program dapat diterima/ditolak. 7) Rencana strategis jangka panjang terkait pengembangan desa Kalibukbuk menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Kalibukbuk Lovina, dengan karakter kekhasannya yaitu sebagai kecamatan dengan nuansa atau konsentrasi kepariwisataan, agar Lovina ke depan menjadi simbol motor penggerak kepariwisataan Buleleng.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan, serta penulis juga dapat memahami pentingnya peran Impelementasi Rancangan Tata Ruang di Kawasan Kalibukbuk Lovina Sebagai Daya Tarik Resort tourism yang digunakan dalam membantu memecahkan permasalahan dalam sektor pariwisata.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini akan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng.
2. Bagi masyarakat setempat, penelitian ini dapat merangsang keterlibatannya di sektor pariwisata.
3. Bagi Pengembangan Institusi, khususnya dalam peningkatan daya saing, dilihat dari perspektif pengembangan institusi, penelitian ini juga memberikan manfaat penting bagi pengembangan institusi, khususnya bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi. Universitas Pendidikan Ganesha memiliki beberapa jurusan yang dapat memberikan dukungan pada peningkatan industri pariwisata di Bali, seperti: Pengembangan destinasi pariwisata, dan beberapa jurusan lain yang memiliki kaitan dengan pengembangan pariwisata. Secara riil, kebermanfaatannya penelitian ini adalah untuk menunjang pengembangan sumber daya dosen dan mahasiswa sebagai

calon profesional maupun pendidik, khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengajaran. Secara lebih spesifik kebermanfaatan penelitian ini bagi pengembangan profesionalitas dosen, mahasiswa dan bagi peneliti sejenis di bidang pengembangan daya dukung bagi pengembangan pariwisata di Bali pada khususnya.

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas upaya peningkatan daya tarik resort tourism dan pengelolaan tata ruang wilayah.

